



**PENGEMBANGAN PARIWISATA KREATIF BERBASIS KEARIFAN
LOKAL DALAM PERSPEKTIF *COLLABORATIVE GOVERNANCE*
STUDI DI KAMPUNG BLANGKON POTROJAYAN KELURAHAN
SERENGAN KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA**

¹ Muhamad Abdel Apaliso, ² Kristina Setyowati

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: ¹Muhabdel07@student.uns.ac.id, ²Kristina@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

Creative tourism is a form of tourism concept that is responsible for the existence of local communities. The city of Surakarta, which is a city with a process of historical growth and development, has made the city of Surakarta city formed from local wisdom, in which case the Blangkon Potrojayan village in Serengan Village, Serengan District is a form of physical heritage that can still be found, but over time the Blangkon Potrojayan village has been degraded since the last 20 years. This study aims to determine the collaboration process between stakeholders and the obstacles that occur in the collaboration process so that it can become a recommendation for the government, private sector and the community to optimize collaboration. The theory used in this study is the collaborative process theory of Anshel and Gash where there are five stages of collaboration, namely (1) face-to-face dialogue, (2) building trust (3) commitment to the process (4) mutual understanding, and (5) intermediary outcomes, while the method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the process of collaborative governance in the development of creative tourism based on local wisdom, in the process this collaboration has been going well, but there are still various obstacles such as the absence of communication forums, sectoral ego by each Stakeholder, limited resources, and less optimal role of the actors involved.

Kata kunci; *Collaborative Governance, Creative Tourism, Local Wisdom*

A. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, pariwisata semakin tumbuh dan berkembang. Semakin mudahnya akses dalam mengetahui informasi mengenai tempat-tempat yang akan dikunjungi menjadi salah satu faktor perkembangan di bidang Pariwisata ini. Tak terkecuali di Indonesia, yang menjadikan pariwisata menjadi salah satu andalan sebagai penggerak perekonomian masyarakat sekitar tempat wisata. Dilihat dari data di situs Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa dari tahun 2015-2018 di sektor pariwisata sumbangan devisa dari tahun ke tahun semakin bertumbuh dari

yang hanya 12,23 Miliar USD di tahun 2015 menjadi 19,29 Miliar (www.bps.go.id, 2019).

Tabel 1 : Jumlah Sumbangan Devisa Sektor Pariwisata Tahun 2015-2018

Wilayah	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata (Miliar US \$)			
	2015	2016	2017	2018
Indonesia	12,23	13,46	15,24	19,29

(Sumber : Badan Pusat Statistika)

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sumber pemasukan devisa terbesar dari Indonesia. Tercatat di tahun 2016 dari sektor Pariwisata menyumbang US\$13,46 miliar yang merupakan penyumbang devisa kedua terbesar setelah CPO (Industri Kelapa Sawit) yang berada di posisi pertama dengan pendapatan sebesar US\$ 15,965 Miliar. Tren ini mengalami peningkatan tiap tahunnya, bahkan diperkirakan sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar di tahun 2022 mengalahkan pemasukan dari migas dan CPO. Hal ini menjadi bukti perkembangan pariwisata sebagai salah satu sumber pemasukan negara yang sangat potensial. Dengan adanya kenaikan devisa dari tahun ke tahun ini menjadikan sektor pariwisata yang juga mendukung SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu *Goals* yang ke 8 berupa pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan semakin meningkatnya kunjungan pariwisata ke daerah-daerah di Indonesia ini juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

Melihat perkembangan pariwisata tersebut, Kota Surakarta juga mulai mengembangkan pariwisatanya. salah satunya yaitu pengembangan produk wisata kreatif. Hal ini tercermin pada arah pembangunan pariwisata Kota Surakarta seperti yang terdapat dalam Perda Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2026. Pariwisata kreatif adalah wujud tanggung jawab terhadap eksistensi komunitas lokal yang tercermin di bidang pariwisata. Dalam hal ini, pariwisata kreatif bertujuan menampung keberadaan usaha menengah dan kecil, memberikan ruang dan kesempatan bagi komunitas untuk berekspresi maupun berinteraksi, mengapresiasi lingkungan, sebagai sarana pengembangan diri dan tidak bersifat masal (Hermantoro dalam Priyatmono, 2013).

Kota Surakarta sendiri merupakan Kota yang kaya akan potensi Pariwisata terutama dibidang kebudayaan yang menjadi kearifan lokal di Kota Surakarta itu sendiri. Bambang, et.al (2019) menjelaskan bahwa kota Surakarta merupakan kota dengan latar belakang tumbuh kembang yang berbasis sejarah yang signifikan mulai

dari lokal, regional maupun nasional Beberapa periode kronologi yang mewakili perjalanan peradaban di Kota Surakarta :Sangiran merupakan jejak asal mula peradaban manusia yang terletak tidak jauh dari kota Surakarta. Kemudian pada periode kerajaan berawal dari kepindahan Keraton Kartasura ke Desa Solo akibat peristiwa Geger Pecinan tahun 1670, merupakan era kehidupan kerajaan tradisional. Selanjutnya masuknya Belanda dengan bendera VOC menandai periode penjajahan kompeni di Surakarta. Interaksi multietnis seperti Bangsa Arab, Cina, Barat menjadi latar belakang tumbuh kembang budaya baik fisik maupun non fisik. Periode berikutnya adalah berlatar belakang dinamika bangsa Indonesia dalam memperjuangkan dan periode awal kemerdekaan .Dinamika interasi beberapa aspek komponen kawasan menjadi spesifik di Surakarta karena menyangkut transformasi format kedaulatan penguasa dari kerajaan menjadi Negara republik. Periode terakhir adalah ketika Surakarta menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui fase pembangunan secara menyeluruh dengan segala dinamika yang melatarbelakangi pertumbuhan segala aspek kehidupan masyarakat sampai saat ini.

Periode dalam proses tumbuh kembang Kota Surakarta tersebut menjadikan Kota Surakarta menjadi kawasan yang terbentuk dari kearifan lokal dimana peninggalannya fisik yaitu berupa artefak, bangunan, dan kelompok bangunan, kawasan sejarah. Sedangkan peninggalan non fisik berupa seni tradisi musik, seni tari, serta ritual-ritual tradisi dan keagamaan. Dalam hal ini, adanya sentra batik di Kampung batik Laweyan, Kampung batik Kauman serta Kampung blangkon di Serengan merupakan bentuk-bentuk peninggalan fisik yang masih bisa kita jumpai di Kota Surakarta dimana kampung-kampung tersebut berpedoman pada pariwisata kreatif. Dalam pengembangan wisata di Kota Surakarta ini terdapat peran beberapa *stakeholders*. Tercatat di dalam perda tersebut terdapat tiga *stakeholders* yang menjadi aktor dalam pembangunan pariwisata di Kota Surakarta yaitu Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi ini disebut *Collaborative Governance*.

Collaborative governance diartikan sebagai suatu sistem dalam pemerintahan yang mengadopsi masukan dan melibatkan organisasi pemerintah maupun non pemerintah dalam mengambil suatu keputusan yang bersifat formal. Dalam pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai stakeholder, dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat, disamping itu ada pembagian peran untuk

melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik, serta aset publik (Chris Ansel & Alison Gash dalam Gian T S & Ulung P, 2016). Seperti keperluan untuk promosi pariwisata ke daerah di luar Solo. Dinas Pariwisata Kota Surakarta dalam hal ini bekerja sama dengan *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA) guna mempromosikan Pariwisata di Kota Surakarta. Menurut Pri Siswanto Ketua ASITA DPC Solo Raya dikutip dari tribunjateng.com masih terdapat sejumlah kendala dalam mengoptimalkan potensi pariwisata di Solo contohnya adalah promosi.

Bambang, *et.al* (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa keberlangsungan industri rumahan blangkon di Serengan mengalami degradasi sejak 20 tahun terakhir sehingga kolaborasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi tersebut perlu dilakukan karena dalam mengembangkan Pariwisata suatu daerah perlu peran berbagai pihak selain itu, dalam pelaksanaannya, pariwisata kreatif ini melibatkan masyarakat langsung, sehingga dengan adanya pengembangan dari sektor pariwisata kreatif ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di kampung Blangkon Potrojayan Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan Kota Surakarta tersebut. Dalam menjalin kolaborasi, tentu memerlukan proses yang panjang.

Menurut Anshell dan Gash dalam Arianti & Satlita indikator proses dalam *collaborative governance* yaitu: (1) *Face to Face Dialogue*, (2) *Trust Building*, (3) *Commitment to Process*, (4) *Shared Understanding*, dan (5) *Intermedite outcome*. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui proses *collaborative governance* yang melibatkan pemerintah Kota Surakarta, Swasta, dan Masyarakat, dalam pengembangan pariwisata kreatif di kampung Blangkon Potrojayan, Serengan, Kota Surakarta dan hambatan yang terjadi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para pengrajin blangkon. Penelitian ini perlu dilakukan dengan harapan hasil penelitian ini bisa menjadi gambaran dan dapat memberikan masukan serta rekomendasi kepada para *stakeholders* yang terlibat untuk dapat memaksimalkan peran dalam proses pengembangan pariwisata kreatif di kampung Blangkon Potrojayan, Serengan, Kota Surakarta.

B. METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui

proses wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengembangan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Surakarta, Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Surakarta, Ketua Pengrajin blangkon Potrojayan dan Ketua ASITA DPC Solo Raya, sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak ketiga berupa data terkait kolaborasi pengembangan Wisata Kreatif berbasis kearifan lokal. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari jurnal, internet, berita, dan juga sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata merupakan komoditas yang perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Di Kota Surakarta sendiri terdapat kampung-kampung wisata kreatif yang menarik untuk dikembangkan, salah satunya yaitu kampung blangkon potojayan dikelurahan serengan. dalam penelitian yang dilakukan oleh Bambang etc (2019) menyebutkan bahwa terjadi degradasi kesejahteraan selama 20 tahun terakhir di kampung blangkon potrojayan, hal ini menyebabkan pentingnya dilakukan kolaborasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung blangkon potrojayan tersebut. Dalam membangun kolaborasi terdapat proses bagaimana kolaborasi tersebut dapat tercipta:

1. *Face to Face Dialogue* (dialog / tatap muka)

Ansell and Gash berpendapat bahwa Komunikasi secara tatap muka (dialog) merupakan salah satu faktor penting yang terdapat dalam collaborative governance. Karena melalui proses dialog antar stakeholder yang interaktif maka akan tercipta pembahasan mengenai kepentingan bersama yang mempermudah tercapainya konsensus atau kesepakatan. Di samping itu, membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman dan komitmen terhadap proses merupakan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses komunikasi secara bertatap muka. Dalam berdialog dengan para stakeholders terkait Dinas pariwisata Kota Surakarta melakukannya dengan menggunakan dua cara yaitu melalui pertemuan satu-persatu dengan para stakeholders terkait. Seperti saat dialog dengan masyarakat, melalui pelatihan dan sosialisasi yang sering dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Surakarta.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta, Weni Andrianto. Menurutnya pelatihan-pelatihan tersebut berguna dalam membantu para POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) dalam mengembangkan keahlian dan

kecakapan sebagai pelaku pariwisata. Keahlian-keahlian tersebut meliputi kemampuan *guiding*, bisa bercerita mengenai tempat-tempat wisata yang dikunjungi dan tau akan sejarah tempat tersebut. Pelatihan dan sosialisasi menerapkan prinsip *the right man on the right place*, yakni menempatkan orang maupun pihak terkait sesuai dengan kapasitas dan tupoksinya. Sifat saling melengkapi antar stakeholder diperlukan dalam proses kolaborasi secara *face to face dialogue*. Selain adanya pelatihan-pelatihan dan sosialisasi, terdapat juga forum komunikasi dimana semua stakeholder terkait berkumpul. Dalam forum komunikasi tersebut membahas peran-peran dari masing-masing stakeholders terkait pengembangan pariwisata kreatif yang berbasis kearifan lokal sehingga tidak terjadi kesalahpahaman maupun kurangnya pemahaman bersama.

2. Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Konsep *trust building* diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa berbagai pihak yang terlibat memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam mengambil keputusan terbaik untuk berbagai pihak. Proses ini diawali dengan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dalam pengembangan pariwisata. Proses ini dilakukan sejak lama. Dalam proses pembangunan *trust building* ini, keharmonisan hubungan antar lembaga kemasyarakatan dengan lembaga pemerintah menjadi point penting yang harus dicapai agar mampu mendukung upaya membangun kepercayaan antar kedua belah pihak. *Trust building* yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata kreatif berbasis kearifan lokal di Kota Surakarta antara pemerintah, swasta, pengelola tempat wisata dan masyarakat cara yang digunakan yaitu dengan komunikasi dan koordinasi.

Komunikasi dan koordinasi dilakukan melalui pertemuan rutin antara stakeholder yang terlibat dalam pengembangan pariwisata dalam forum komunikasi yang diadakan satu bulan sekali. Dalam forum tersebut membahas permasalahan bersama, dan peran-peran dari masing-masing stakeholders dalam mengembangkan pariwisata dengan begitu dalam membangun kepercayaan selalu terjaga. Komunikasi dan koordinasi memegang peranan yang penting terhadap efektifitas dan efisiensi tujuan dalam pengembangan pariwisata. Hal tersebut disebabkan karena proses membangun kepercayaan merupakan proses yang berliku dan berlangsung secara kontinyu. Dalam pengembangan pariwisata kreatif yang berbasis ini sejak dirintis dari tahun 2017 komunikasi yang terjalin sangat baik. Karena pada dasarnya antara

stakeholders satu dengan yang lainnya saling terkait dan saling membutuhkan maka dalam membangun kepercayaan sudah terjalin dan mudah saja dilakukan.

3. *Commitment to Process* (Komitmen Bersama)

Ansell dan Gash mengemukakan bahwa pada dasarnya para pemangku kepentingan tidak berkenan apabila kepentingannya diabaikan atau hanya dianggap sekedar mengamankan posisi mereka. Dengan demikian, bagaimanapun caranya mereka berusaha untuk menggoalkan kepentingan mereka. Namun sebaliknya, pada hakekatnya komitmen merupakan suatu bentuk keyakinan bahwa melalui *collaborative process* akan menghantarkan setiap pemangku kepentingan untuk menciptakan keuntungannya. Selanjutnya (Arianti & Satlita, 2018) mengatakan bahwa komitmen merupakan proses untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pemecahan masalah dan solusi dilakukan secara bersama-sama dan untuk mendapatkan manfaat bersama. (Sambodo & Pribadi, 2016). Pada tahapan proses ini komitmen yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat memiliki tujuan yang sama yaitu pengembangan pariwisata dikota Solo itu sendiri menjadi destinasi wisata favorit baik untuk wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman) dengan pelaksanaan masing-masing stakeholder sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Namun dalam hal ini peran aktif masyarakat masih kurang dan masih sedikit masyarakat yang mau untuk terjun langsung menjadi pegiat wisata terutama wisata kreatif. Pada tahap ini dapat dikatakan dalam pengembangan pariwisata kreatif yang berbasis kearifan lokal di Kota Surakarta, komitmen yang dibangun dari masing-masing pihak yang terlibat sudah berjalan dengan baik. Dalam proses kerjasama juga berjalan dengan baik karena bertujuan untuk kepentingan bersama bukan semata-mata hanya kepentingan satu pihak saja. Namun masih kurangnya peran aktif masyarakat menjadi masalah dalam membangun komitmen ini.

4. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Shared Understanding adalah kesepakatan mengenai pengetahuan atau informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mengatasi suatu permasalahan. Menurut Ansell dan Gash, di dalam Collaborative Governance, dijelaskan bahwasannya aktor-aktor yang terlibat haruslah satu faham dan satu persepsi mengenai tujuan yang akan diraih. Di dalam collaborative governance, juga harus satu faham guna mencapai tujuan yang akan diraih (Arianti & Satlita, 2018). Dalam

penelitian ini, *shared understanding* dalam pengembangan pariwisata kreatif sudah berjalan dengan baik. Karena memiliki tujuan yang sama antara pemerintah, swasta maupun masyarakat yang pada dasarnya untuk kemajuan pariwisata Kota Surakarta.

5. *Intermedite outcome* (Pencapaian hasil).

Tujuan yang ingin dicapai dari kolaborasi pengembangan pariwisata kreatif ini sendiri yaitu memajukan pariwisata di Kota Surakarta selain itu juga kolaborasi ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya intensitas pariwisata di Kota Surakarta secara otomatis juga akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat sebagai pelaku pariwisata. Bekerja sama dengan swasta dalam mempromosikan produk-produk hasil buatan dari masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Diharapkan dengan hasil yang diterima masyarakat ini dapat meningkatkan jumlah dari para pelaku pariwisata kreatif dengan begitu pendapatan daerah melalui pariwisata juga akan meningkat. Hasil sementara adanya kolaborasi ini yaitu dengan adanya forum komunikasi dan pelatihan-pelatihan tersebut telah meningkatkan jumlah tenaga profesional pelaku pariwisata seperti tenaga *tour guiding*. Jadi hasil yang tercipta sudah ada namun masih belum optimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia dan dana dalam mengembangkan pariwisata kreatif berbasis kearifan lokal di Kota Surakarta.

Hambatan terkait *collaborative governance process* dalam pengembangan pariwisata kreatif berbasis kearifan lokal di Kampung Blangkon Potrojayan Kota Surakarta

1. Belum Adanya Forum Komunikasi

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam suatu kolaborasi, dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dalam proses *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata kreatif yang berbasis kearifan lokal di kampung blangkon Potrojayan Kota Surakarta komunikasi yang dilakukan tidak rutin dilakukan. Forum komunikasi diadakan hanya sesuai kebutuhan dari *stakeholder* terkait. Proses komunikasi ini akan sangat berpengaruh terhadap koordinasi antar *stakeholder*. Sebuah koordinasi yang baik membutuhkan interaksi dari berbagai pihak secara berkesinambungan, yang mana interaksi tersebut dapat menghasilkan informasi baru atau sebuah kesepakatan dari berbagai pihak (Ervianti, 2018:10). Dengan adanya interaksi dan koordinasi yang baik, maka masing-masing *stakeholders* akan mampu mencapai tujuan bersama serta merealisasikan kinerja yang diinginkan. Dalam

kolaborasi upaya pengembangan pariwisata kreatif seperti di Kampung Blangkon, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, swasta, dan pelaku usaha wisata kreatif dapat menghambat proses kolaborasi dalam pengembangan tersebut.

2. Ego-sektoral oleh masing-masing *Stakeholders*

Permasalahan ego-sektoral menjadi sebuah hambatan yang sering terjadi dalam sebuah kolaborasi ataupun proses yang melibatkan banyak pihak di dalamnya. Permasalahan ego-sektoral ini muncul karena masing-masing *stakeholders* memiliki gengsi dalam berkoordinasi dengan instansi lain ataupun merasa bahwa kepentingan pribadi lebih penting dibandingkan tujuan bersama (Febrian, 2015:41). Dalam penelitian ini adanya ego-sektoral juga terjadi dalam proses kolaborasi dimana dijelaskan bahwa adanya ketidakmauan pelaku usaha satu dengan yang lain dalam membagikan informasi yang didapat. Hal ini menghambat upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan informasi serta memajukan pariwisata di Surakarta serta menyejahterakan masyarakat di wilayah kampung wisata.

3. Kurang maksimalnya peran aktor yang terlibat

Hambatan yang terjadi dalam pengembangan pariwisata kreatif di Kota Surakarta ini yaitu belum optimalnya peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Dalam berkolaborasi perlu adanya peran aktif dari masing-masing pihak yang terlibat baik dari Pemerintah, Swasta maupun dari masyarakat. Namun karena peran dari masyarakat sendiri yang masih belum optimal menjadi salah satu penghambat adanya proses kolaborasi yang terjadi.

4. Keterbatasan sumber daya

Salah satu tolak ukur keberhasilan *collaborative governance* menurut teori De Seve adalah *Access to resources* (akses terhadap sumberdaya). Dalam pengembangan pariwisata kreatif yang berbasis kearifan lokal di Kota Surakarta keterbatasan ada pada sumber daya manusia dan masalah keterbatasan dana. Dimana masih sedikitnya tenaga atau lembaga sertifikasi profesi pariwisata dan ekonomi kreatif. Kurangnya tenaga profesi berdampak pada kurangnya jumlah pelaku usaha profesional dalam bidang ekonomi kreatif. Sedangkan dari keterbatasan dana ini terjadi karena masih minimnya investor di bidang pariwisata sehingga menyebabkan keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur dan sertifikasi bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

D. SIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Collaborative governance process* dalam pengembangan pariwisata kreatif di Kota Surakarta sudah terjalin dengan cukup baik namun masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan adanya forum komunikasi yang menyebabkan proses kolaborasi mudah saja dilakukan serta pelatihan-pelatihan yang menyebabkan bertambahnya jumlah tenaga professional pelaku pariwisata yang berguna dalam pengembangan wisata kreatif dikota Surakarta, namun masih terdapat berbagai kendala dalam proses tersebut yang menyebabkan kolaborasi yang terjalin masih belum optimal kendala yang terjadi yaitu :

1. Belum maksimalnya Forum Komunikasi
2. Ego-sektoral masing-masing *stakeholders*
3. Kurangnya peran aktif dari masyarakat
4. Keterbatasan sumber daya

DAFTAR PUSTAKA

- (2019, April 27). Retrieved from Kementrian Pariwisata: <http://www.kemenpar.go.id>
- Arianti, D., & Satlita, L. (2018). The Collaborative Governance on the Development of Mangrove Baros Conservation in the Village of Tirtohargo Kretek District Bantul Regency. *Journal Student UNY*, 7(6), 809-827. Retrieved April 27, 2019, from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/view/13177>
- Kumalasari, I., & Dewi, U. (2017). Collaborative Governance Dalam Penanganan Kasus Gangguan Jiwa di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Journal Student UNY*, 6(5), 469-476. Retrieved April 27, 2019, from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/view/9205/8888>
- Mukti, A. H. (2018, Juli 6). *Tribun Jateng*. Retrieved from <http://jateng.tribunnews.com/2018/07/06/baru-dilantik-ketua-dpc-solo-raya-janji-optimalikan-potensi-wisata-solo>
- Mutiawati, T., & Sudarmo. (2017). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 48-62.
- Richards, G. (2009). Creative tourism and local development. *Santa Fe: Sunstone Press*, 78-90.
- Sambodo, G. T., & Pribadi, U. (2016). Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. *Journal Of Governance and Public Policy*, 3(1), 94-123. doi:10.18196/ jgpp.2016.0052

Solotrust.com. (2018, Agustus 29). Retrieved from <https://www.solotrust.com/read/10988/Dinas-Pariwisata-Solo-Upayakan-Kolaborasi-Antar-Sub-Sektor-Ekonomi-Kreatif>

Triratama, B., Winarto, Y., & Yuliani, S. (2019). Model Pengembangan Kampung Wisata Blangkon di Surakarta Berbasis Konsep Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan*, XVII(2), 293-302. doi:10.20961